

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi Calon Legislatif menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memenangkan Pemilihan Umum Legislatif di daerah, semua berlomba untuk memenangkan hati rakyat sebagai jalan sosialisasi partai untuk mencapai politik kekuasaan (Schroder, 2010). Berbagai cara yang digunakan Caleg dalam meraup suara diantaranya seperti, membagikan kaos dan sembako, membagikan kalender disertai gambar wajah Caleg, membagikan Propaganda media melalui media sosial seperti Facebook, Grup Whatsapp, Twitter. Ataupun membagikan selebaran sebagai bahan ajakan untuk memilih Calon Anggota Legislatif, semuanya dilakukan untuk mempersembahkan kursi ditingkat Legislatif baik di pusat hingga kepada daerah yang tersebar (Firmanzah, 2008)

Namun kurangnya pendidikan politik yang didapatkan warga negara dalam memilih wakilnya di kursi rakyat menjadikan rakyat lebih memilih acuh dan tidak peduli terhadap orang yang dipilihnya baik Calon Anggota Legislatif yang mengkampanyekan di ranah jalan seperti poster, baliho atau selebaran yang dibagikan atau melalui media sosial. Tidak ada pendidikan politik yang tersampaikan kepada masyarakat luas dan akhirnya masyarakat melakukan Teknik golput atau tidak memilih didalam proses pemilu (Ranggayoni, 2020).

Partai Politik harus dapat meyakinkan hati masyarakat atas pilihan politiknya melalui kegiatan partai politik seperti sosialisasi politik, pendidikan politik, sehingga mampu meyakinkan masyarakat dalam memilih Anggota Legislatif. Semua dapat dilakukan bila kesinambungan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan peraturan yang ditaati oleh warga negara, sehingga kepercayaan masyarakat harus dimunculkan dengan baik melalui kinerja politik para pemegang kekuasaan yakni Wakil Rakyat yang berada di kursi parlemen (Muhtadi, 2008)

Para Calon Legislatif menggunakan prinsip yang sudah ditanamkan oleh partai sehingga asimilasi kebudayaan politik dapat terjadi di tengah masyarakat, dan terlihat karakteristik setiap calon legislatif dalam mengkampanyekan dirinya, ada yang terlihat langsung melalui beberapa kegiatan yang turun kepada masyarakat ataupun melakukan advokasi terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti pendistribusian sembako hingga memperbaiki rumah tidak layak huni (Indriani, 2018).

Partai politik menjalankan tugas politiknya dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat melalui ideologi partai serta program yang dilakukan untuk memperkenalkan partai kepada muka umum. Berpijak kepada definisi partai yang berbeda namun terdapat kesamaan dalam menentukan tujuan umum yakni partai dalam menempatkan anggotanya dalam kekuasaan sebagai penyalur aspirasi masyarakat baik khalayak umum, anggota serta kader partai (Said Gatara, 2017)

Pemilih dalam konteks memilih partai politik tidak terlepas dari anggapan serta citra partai yang dibuat, atau membuat sebuah kedekatan dengan masyarakat sebagai salah satu strategi dalam kegiatan Pemilihan Umum. beberapa cara serta komunikasi politik yang dibangun partai politik menambah ketertarikan pemilih karena dianggap dapat beradaptasi dalam lingkungan sosial kemasyarakatan (Putra, 2022).

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses untuk memilih pemimpin didalam fungsi pemerintahan dalam rangka menjalankan proses demokrasi. Pemilu diadakan sebagai cara untuk menentukan pemimpin di tingkat legislatif maupun eksekutif (Hidajat, 2017).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 dan 3 menjelaskan Pemilihan Umum dalam pelaksanaanya memiliki asas secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dengan berpedoman terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum adalah kegiatan dalam memilih pemimpin di tingkat legislatif maupun eksekutif baik Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Legislatif dari tingkat pusat RI, tingkat Provinsi, hingga Anggota Legislatif di tingkat Kota/ Kabupaten. (Peraturan Pemerintah RI, 2017).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum) sesuai dengan cita-cita demokrasi yang tertuang dalam Peraturan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan sesuai tuntutan perkembangan politik, kaidah demokrasi, serta keadilan yang berkembang didalam masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Ada empat belas (14) partai yang mengikuti proses Pemilihan Umum pada tahun 2019 yaitu : Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Salah satu partai yang ikut Pemilu 2019 adalah PKB. PKB merupakan partai berasaskan Pancasila didirikan oleh para Ulama dari kalangan *Nahdliyin* sehingga garis besar partai tidak dapat dilepaskan dari peran Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada tanggal 21 Mei 1998 oleh beberapa tokoh bangsa antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur), K.H. Mustofa Bisri, serta K.H. Ilyas Ruchyat. Namun PBNU melihat PKB sebagai partai kaum nahdliyin namun melalui Mukhtamar NU ke-27 menghasilkan keputusan bahwa PBNU tidak terikat secara yuridis dengan partai politik, sehingga Partai Kebangkitan Bangsa hanya sebagai penyalur aspirasi kaum *Nahdliyin* dalam memperkuat maksud politik. Maka dalam hal ini, Partai Kebangkitan Bangsa perlu melihat penting mendirikan organisasi partai yang sesuai dan legal secara hukum untuk memperkuat intelektualitas politik warga NU. Secara umum PKB terbuka dalam lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang di aplikasikan pada visi, misi dan program perjuangan yang dibentuk oleh pendidikan kepemimpinan dan perorganisasian partai (Indriani, 2018a).

Dalam Pemilihan Umum 2019, Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Cimahi berkontestasi pada pemilihan Calon Anggota Legislatif dalam 6 daerah Pemilihan (dapil) sebagai berikut, Kota Cimahi 1 (Cipageran, Citeureup) sebanyak 7 kursi, Kota Cimahi 2 (Cibabat, Pasirkaliki) sebanyak 6 kursi, Kota Cimahi 3 (Cibereum, Melong) sebanyak 10 kursi, Kota Cimahi 4 (Utama, Leuwigajah, Cibeber) sebanyak 9 kursi, Kota Cimahi 5 (Baros, Cigugur Tengah, Karangmekar) sebanyak 7 Kursi, Kota Cimahi 6 (Cimahi, Padasuka, Setiamanah) sebanyak 6 kursi. (KPU Kota Cimahi, 2019)

Total Anggota Dewan terpilih di Kota Cimahi sebanyak 45 kursi. Pada tahun 2014 Partai Kebangkitan Bangsa Kota Cimahi hanya mendapatkan perolehan 2 kursi pada pemilihan Calon Legislatif yakni Acep Jamaludin, dan K.H. Yahya Abdul Aziz, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan suara sebanyak 3 kursi yang ditempati yakni Dede Latif, Asep Sutisna, Acep Jamaludin.

Tabel 1.1 Perolehan Kursi DPRD Kota Cimahi 2 Periode

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Kurun Waktu Periode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	2	3
Gerindra	6	7
PDI-P	7	6
Golkar	4	6
NasDem	4	4
PKS	5	7
PPP	5	3
PAN	3	2
Hanura	4	1

Demokrat	5	6
Jumlah Anggota Partai	45	45
Jumlah Partai	10	10

Adanya peningkatan perolehan kursi PKB menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti berfokus untuk meneliti Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai yang memiliki strategi dalam pemenangan pemilu 2019. Dalam hipotesa penulis adanya unsur strategi partai yang harus diteliti melihat adanya perkembangan signifikan pada perolehan suara yang didapatkan PKB, dua hal yang menjadi penting adalah strategi yang sesuai antara proses pemilu dan juga proses dalam menentukan strategi partai politik. Maka peneliti memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengetahui strategi politik dalam pemenangan pemilu 2019 di Kota Cimahi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi politik Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Cimahi ?
2. Apa pengaruh strategi politik terhadap pemilihan Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilu 2019 di Kota Cimahi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi politik Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui pengaruh strategi politik terhadap pemilihan Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilu 2019 di Kota Cimahi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Peneliti berharap dapat menambah keilmuan dalam Ilmu Politik serta dapat memberikan sumbangan ilmu terhadap mahasiswa maupun akademisi politik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau bacaan terhadap mahasiswa dan masyarakat luas terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Peneliti berharap dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan acuan dalam mengembangkan strategi partai politik didalam pemenangan Pemilihan Umum.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi pendidikan politik masyarakat luas terkhusus bagi mahasiswa maupun akademisi politik dalam mengetahui strategi politik yang digunakan partai politik.
- c. Penelitian ini dapat mengasah pengetahuan penulis dalam membuat karya ilmiah skripsi, serta mempelajari masalah yang diteliti secara lebih mandalam.

1.5 Kerangka Berfikir

Secara garis besar, bahwa strategi politik merupakan cara yang dilakukan untuk mewujudkan pemikiran serta capaian tertentu dalam bidang politik. Seperti contoh yaitu, pemberlakuan segala peraturan yang baru mengenai pembaharuan regulasi, serta pembagian kekuasaan yang terjadi. Strategi digunakan sebagai cara dalam merealisasikan beberapa rencana jangka pendek ataupun jangka panjang terakit perencanaan, penganggaran serta pengorganisasian. Adapaun didalam pelaksanaan membutuhkan komunikasi yang dibentuk dengan memperlihatkan beberapa macam teknik yang sangat penting membawa keuntungan bagi partai ataupun calon politik, sehingga langkah yang ditentukan dapat memperhitungkan gerakan lawan politik (Schroder, 2010).

Strategi dibutuhkan setiap calon dalam menentukan arah gerak politis dalam hal ini Partai Kebangkitan Bangsa menggunakan strategi dalam kemenangan Pemilihan Umum 2019 di Kota Cimahi sebagai salah satu perwujudan strategi politik dalam ranah pemilihan Anggota Legislatif. Dalam pelaksanaan strategi dibutuhkan beberapa tahapan dan cara yang selanjutnya dapat menentukan arah partai secara keseluruhan dibutuhkan juga komunikasi politik yang dibangun, organisasi internal partai yang komprehensif serta modalitas yang dibentuk sebagai arah pergerakan kedepan, semua mencakup perencanaan konseptual mengenai teknik dalam strategi politik.

Peran serta modal yang digunakan Partai Kebangkitan Bangsa untuk dapat melakukan distribusi kader kedalam parlemen melalui proses pemilihan umum menandakan strategi dapat dijalankan dengan baik. Dalam melakukan strateginya diperlukan teknis khusus yang dapat menjadi jalan partai politik menang dan dapat menempatkan anggotanya menduduki parlemen. Hal tersebut yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai arah gerak dalam menyusun strategi politik dengan memperhatikan bentuk serta basis yang dimiliki sebagai salah satu cara dalam meraih kekuasaan (Pito, 2013).

Pendekatan melalui komunikasi politik dan sosialisasi politik yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Cimahi menjadikan daya tarik dalam meyakinkan pemilih agar dapat memilih dalam pertarungan pemilu. Kegiatan pendekatan yang merupakan komunikasi politik merupakan gejala politik yang timbul sebagai sebuah pesan yang disampaikan terhadap pemilih (Said Gatara, 2017). Disamping itu, dalam kegiatan kampanye politik menjadikan ajang partai dalam menyampaikan visi misi terhadap masyarakat luas baik dalam selebaran yang dibagikan, poster, orasi langsung atau iklan dalam bentuk baliho yang dapat dilihat oleh masyarakat, sehingga kemenangan pemilu dapat tercapai atas strategi yang dibuat dalam institusi partai politik (Abdul Mukhtie Fadjar, 2013).

Menurut Budiarjo (2008) sosialisasi partai politik mendukung terhadap tujuan kemenangan pemilu melalui pendidikan serta tindakan indoktrinasi yang dilakukan partai politik, melalui proses sosialisasi masyarakat lebih mengenal lebih mendalam

tentang mekanisme, bentuk, ataupun simbol yang disampaikan partai. Proses memobilisasi massa untuk dapat memanipulasi masyarakat terdapat dalam pengertian aspek psikologis dan sosiologis pemilu.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir

